

No	Indikasi Program	Lokasi	Sumber	Instansi Pelaksana	TAHAPAN DAN TAHUN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM																			
					I					II					III					IV				
					2018- 2023					2024 - 2028					2029 - 2033					2034 - 2038				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
3.4	Pelestarian potensi lingkungan pantai seperti hutan mangrove	kawasan pesisir di sekitar kawasan perluasan bandara	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup																				
3.5	Pengendalian dan pengawasan pengolahan limbah hasil dari aktivitas di bandara terhadap lingkungan pesisir	kawasan perluasan bandara	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup																				
3.6	Monitoring dan evaluasi kegiatan bandara sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang	kawasan pesisir di sekitar kawasan perluasan bandara	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup																				
4.	Zona Perikanan Tangkap																							
4.1	Pemutakhiran data (armada, alat tangkap, kelompok usaha produksi dan pengolahan) perikanan tangkap untuk menghindari <i>illegal fishing</i>	Di seluruh kecamatan pesisir	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan																				
4.2	Pembangunan sistem informasi daerah penangkapan ikan dengan mekanisme koordinasi kelembagaan antar Provinsi dan Daerah	Seluruh Kabupaten / Kota Pesisir Provinsi Jawa Timur	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informasi																				
4.3	Pengembangan jumlah armada dan alat tangkap	Di seluruh kecamatan pesisir	APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan																				
4.4	Pengembangan kapasitas skala usaha nelayan dan pengolah hasil perikanan	Di seluruh kecamatan pesisir	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM																				
4.5	Kajian pengembangan rekayasa teknologi pada kawasan rawan bencana dan perubahan iklim	Seluruh Kabupaten / Kota Pesisir Provinsi Jawa Timur	APBD	BPBD																				
4.6	Implementasi teknologi dan monitoring pada kawasan rawan bencana dan perubahan iklim sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang	Seluruh Kabupaten / Kota Pesisir Provinsi Jawa Timur	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan dan BAPPEPROV, LANTAMAL V, Ditpol Air Polda Jatim																				
4.7	Sosialisasi dan pelatihan terkait Kelompok Usaha Bersama (KUB)	Di seluruh kecamatan pesisir	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM																				
4.8	Pelatihan Pengembangan Ekonomi Lokal untuk desa-desa pesisir	Seluruh Kabupaten / Kota Pesisir Provinsi Jawa Timur	APBD	Dinas Koperasi dan UKM																				
5.	Zona Perikanan Budidaya																							
5.1	Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pemasaran produk hasil laut	Di seluruh kecamatan pesisir dan wilayah perairan 0-12 mil	APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan																				
5.2	Pembangunan dan pemeliharaan pusat pembenihan kegiatan perikanan budidaya	Di seluruh kecamatan pesisir dan wilayah perairan 0-12 mil	APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kem Kelautan dan Perikanan																				

No	Indikasi Program	Lokasi	Sumber	Instansi Pelaksana	TAHAPAN DAN TAHUN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM																			
					I					II					III					IV				
					2018- 2023					2024 - 2028					2029 - 2033					2034 - 2038				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5.3	Pengembangan kawasan pesisir berbasis minapolitan dengan melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi dan Daerah	Di seluruh kecamatan pesisir dan wilayah perairan 0-12 mil	APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan																				
5.4	Kajian pengembangan rekayasa teknologi pada kawasan rawan bencana dan perubahan iklim	Seluruh Kabupaten / Kota Pesisir Provinsi Jawa Timur	APBD	BPBD																				
5.5	Implementasi teknologi dan monitoring pada kawasan rawan bencana dan perubahan iklim sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang	Seluruh Kabupaten / Kota Pesisir Provinsi Jawa Timur	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan dan BAPPEPROV, LANTAMAL V, Ditpol Air Polda Jatim																				
5.6	Pembatasan penggunaan bahan kimia untuk kegiatan perikanan budidaya	Pada zona perikanan budidaya wilayah perairan 0-12 mil	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup																				
6.	Zona Industri																							
6.1	Pengembangan kawasan industrial estate berbasis komoditas laut (Cold storage, KJA Offshore)	Di zona industri	APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeprov, Dinas Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan																				
6.2	Pengembangan lokasi garam di kawasan-kawasan potensial sesuai dengan standar	Di pesisir selatan Madura dan pesisir UtaraTuban	APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeprov, Dinas Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan																				
6.3	Pengembangan lokasi bioteknologi	Di Pamekasan, Pacitan, dan Banyuwangi	APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeprov, Dinas Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan																				
6.4	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung pengolahan hasil perikanan, lokasi manufaktur, dan lokasi maritim	Di seluruh kecamatan pesisir	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan																				
6.5	Penyiapan lokasi hilir pendukung kegiatan eksplorasi tambang	Di zona industri	APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeprov, Dinas Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan																				
6.6	Peningkatan kualitas SDM lokal di bidang industri	Di sekitar zona industri	APBD	Dinas Perindustrian																				
6.7	Pengendalian dan pengawasan pengolahan limbah hasil aktivitas terkait industri	Di zona industri	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup																				
6.8	Pegawasan dan pengendalian terhadap kemungkinan bencana akibat industri	Di zona industri	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup																				

No	Indikasi Program	Lokasi	Sumber	Instansi Pelaksana	TAHAPAN DAN TAHUN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM																			
					I					II					III					IV				
					2018- 2023					2024 - 2028					2029 - 2033					2034 - 2038				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6.9	Monitoring dan evaluasi kegiatan industri sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang	Di zona industri	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup																				
7. Zona Pertambangan																								
7.1	Identifikasi pemetaan potensi pasir laut dan minyak bumi	Di zona pertambangan	APBN, APBD	Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral																				
7.2	Peningkatan kualitas SDM lokal di bidang pertambangan	Di sekitar zona pertambangan	APBD	Dinas Perindustrian																				
7.3	Pendataan dan monitoring evaluasi kegiatan pertambangan secara berkala dengan parameter-parameter pengukuran berkelanjutan sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang	Di zona pertambangan	APBD	Dinas Perindustrian																				
7.4	Pegawasan dan pengendalian terhadap kemungkinan bencana akibat pertambangan	Di zona pertambangan	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup																				
7.5	Pengawasa kegiatan pengolahan limbah akibat proses pertambangan	Di zona pertambangan	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup																				
8. Zona Energi																								
8.1	Pengembangan PLTU/PLTGU pada kawasan yang sesuai	Di zona energi	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup																				
8.2	Peningkatan kualitas SDM lokal di bidang energi	Di sekitar zona energi	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup																				
8.3	Pegawasan dan pengendalian terhadap kemungkinan bencana akibat PLTU/PLTGU	Di zona energi	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup																				
8.4	Pengawasan kualitas limbah buangan hasil PLTU/PLTGU	Di zona energi dan sekitarnya	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup																				
B. Rencana Kawasan Konservasi																								
1. Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil																								
1.1	Penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan KP3K	Di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan																				
1.2	Sosialisasi penetapan KP3K	Di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan																				
1.3	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi KP3K	Di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan																				
1.4	Penyusunan mekanisme pemberian insentif kepada masyarakat yang melestarikan KKP3K	Di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup																				

No	Indikasi Program	Lokasi	Sumber	Instansi Pelaksana	TAHAPAN DAN TAHUN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM																			
					I					II					III					IV				
					2018- 2023					2024 - 2028					2029 - 2033					2034 - 2038				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.5	Kordinasi pengawasan terpadu yang terdiri dari unsur aparat, masyarakat lokal, maupun CSR dalam menjaga atau melindungi areal KKP3K	Di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeprov, LANTAMAL V, Ditpol Air Polda Jatim																				
1.6	Pemberdayaan Pokwasmas	Di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan																				
1.7	Rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan padang lamun	Di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan																				
1.8	Monitoring dan evaluasi kegiatan di kawasan KKP3K sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang	Di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan																				
2.	Kawasan Konservasi Perairan																							
2.1	Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	Di Kawasan Konservasi Perairan	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan																				
2.2	Sosialisasi penetapan Kawasan Konservasi Perairan	Di Kawasan Konservasi Perairan	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan																				
2.3	Penyusunan Kajian Kawasan Konservasi Perairan (KKP)	Kabupaten Banyuwangi, Jember, Malang, Trenggalek, Pacitan, Sumenep	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan																				
2.4	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Kawasan Konservasi Perairan	Di Kawasan Konservasi Perairan	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan																				
2.5	Penyusunan mekanisme pemberian insentif kepada masyarakat yang melestarikan KKP	Di Kawasan Konservasi Perairan	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup																				
2.6	Kordinasi pengawasan terpadu yang terdiri dari unsur aparat, masyarakat lokal, dan CSR dalam melakukan perlindungan areal KKP	Di Kawasan Konservasi Perairan	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeprov, LANTAMAL V, Ditpol Air Polda Jatim																				
2.7	Pemberdayaan Pokwasmas	Di Kawasan Konservasi Perairan	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan																				
2.8	Rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan padang lamun	Di Kawasan Konservasi Perairan	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan																				
2.9	Monitoring dan evaluasi kegiatan di kawasan KKP sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang	Di Kawasan Konservasi Perairan	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan																				
3.	Mitigasi dan Adaptasi Bencana																							
3.1	Kajian kawasan pesisir rawan bencana tsunami dan banjir rob	Di seluruh kabupaten pesisir	APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan																				

No	Indikasi Program	Lokasi	Sumber	Instansi Pelaksana	TAHAPAN DAN TAHUN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM																			
					I					II					III					IV				
					2018- 2023					2024 - 2028					2029 - 2033					2034 - 2038				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
3.2	Pembangunan struktur buatan/alami untuk penanggulangan bencana tsunami dan banjir rob, dapat berupa <i>breakwater</i>	Pesisir rawan bencana	APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PU																				
3.3	Penyusunan rencana induk tanggap bencana kawasan pesisir	Pesisir rawan bencana	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup																				
3.4	Pemasangan rambu dan alat pengingat bencana	Pesisir rawan bencana	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU																				
3.5	Rehabilitasi lahan pesisir yang potensial bencana abrasi	Pesisir rawan bencana abrasi	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA, Dinas PU																				
3.6	Rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan padang lamun	Wilayah perairan 0-12 mil Provinsi Jawa Timur yang rawan bencana	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan																				
3.7	Sosialisasi sistem tanggap bencana	Pesisir rawan bencana	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup																				
C.	Kawasan Strategis Nasional																							
1.	Koordinasi pengelolaan kawasan strategis nasional	Di kawasan strategis nasional	APBN, APBD	KKP, DKP, LANTAMAL V																				
2.	Koordinasi pengelolaan kawasan strategis nasional tertentu	Di kawasan strategis nasional tertentu	APBN, APBD	KKP, DKP, Badan Nasional Perbatasan, TNI AL																				
D.	Alur Laut																							
1.	alur pelayaran																							
1.1	Penetapan Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS)	Pada alur pelayaran	APBN, APBD	Kemenhub, Dinas Perhubungan																				
1.2	Pemasangan dan pemeliharaan SBNP pada alur pelayaran	Pada alur pelayaran	APBN, APBD	Dinas Perhubungan																				
1.3	Peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran	Pada alur pelayaran	APBN, APBD	Kepmenhub, Dinas Perhubungan dan Dinas PU																				
1.4	Penetapan daerah labuh kapal yang harmonis dengan aktivitas lainnya	Pada alur pelayaran	APBN, APBD	Dinas Perhubungan																				
1.5	Sosialisasi dan pemenuhan standar minimum ketentuan kualitas buangan limbah kapal	Pada alur pelayaran	APBN, APBD	Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPLHD																				
1.6	Monitoring dan evaluasi kegiatan di sekitar kawasan alur pelayaran sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang	Pada alur pelayaran	APBD	Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPLHD																				

